

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Keaslian Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Model Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah	10
2.2. Model-Model Kerjasama Pengusahaan Alur Pelayaran Di Sungai	13
2.3. Pelayaran	25
2.4. Angkutan Perairan	28

2.5. Kenavigasian	30
2.6. Kepelabuhanan	32
2.7. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	35
2.8. Alur Pelayaran	37
2.9. Telekomunikasi Pelayaran	39
2.10. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	40
2.11. Pengerukan	41
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	43
3.1. Sifat dan Jenis Penelitian	43
3.2. Macam Penelitian.....	44
3.3. Analisis Data	50
3.4. Jalannya Penelitian.....	50
3.5. Tempat dan Waktu Penelitian	51
3.6. Sistematika Penulisan	51
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Hal Pengusahaan Alur Pelayaran Di Sungai Yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha	52
4.1.1. Pengaturan Pengusahaan Alur Pelayaran di Sungai Sebelum Diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	52
4.1.2. Pengaturan Pengusahaan Alur Pelayaran di Sungai Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	72

4.2. Pelaksanaan Kerjasama Pengusahaan Alur Pelayaran Di Sungai Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha.....	101
4.2.1 Praktek Kerjasama Pengusahaan Alur Pelayaran Barat Surabaya oleh Pemerintah dengan Badan Usaha	101
4.2.2. Model-Model Kerjasama Pengusahaan Alur Yang Telah Diadopsi Di Peraturan Perundang-Undangan Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha.....	113
BAB 5 PENUTUP	134
5.1. Kesimpulan	134
5.2. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138